

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Alim, S., Kumala, A., & Hair, A. (2019). *New Public Service In Bandung Through The Concept Of Smart City New Public Service Kota Bandung Melalui Konsep Smart City*. *Journal of Politic and Policy*, 2(1), 95–108.
- Benveniste, Guy. 1997. *Birokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dandut dkk 2018, *Reformasi Birokrasi Di Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung*, jurnal ilmu sosial dan administrasi negara, Vol 2 No. 2
- Denhardt J. V. and R. B. Denhardt, *The New Public Service: Serving, not Steering*, New York, M.E. Shape, 2003
- Dimock, Dahl, dan Waldo. (2017). NPS berakar dari beberapa teori, yang meliputi: Teori tentang demokrasi kewarganegaraan;
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2011. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada.
- Fandy Tjiptono. 2009. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hayat. 2014. “*Konsep Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance*”. *Jurnal Borneo Administraror*. Volume 10, Nomor 1, hlm. 59-84
- Hendry Ch Soselisa. 2021. *Penerapan Prinsip New Public Service dalam Pelayanan STNK pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap*. *Public Policy, Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis*, Vol.2 No.2
- I Dewa Gede Soni Aryawan ATD, M.Eng.Sc. 2020. *Mal Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Publik*. Malang: Media Nusa Creative
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Komarudin, 2014. *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Genesindo
- Mariana, dkk. 2010. "Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-Government". Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moenir. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Pers. Jakarta
- Mustafa, D. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, H. W., & Murtiningsih, S. (2016). Paradoks Gender (Kajian Feminisme Etis terhadap Kemunculan Inong Balee dalam Kekerasan Politik di Aceh). *Jurnal Filsafat*, 18(3), 295–314.
- Osborne, David and Gaebler, T. (1992) *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*, New York: Penguins Books.
- Pasolong, Harbani, 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Prasojo, Eko. 2008. "Reformasi Birokrasi di Indonesia": Beberapa Catatan kritis", *Jurnal Bisnis & Birokrasi*. Vol. XIV/No.1 Januari. Departemen Ilmu Administrasi Fisip UI.
- Partiwi, S. (2020). *Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kabupaten Kebumen*. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 4(1), 12–24.
- Puryatama, A. F., & Haryani, T. N. 2020. *Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia*. Kybernan: *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(1), 40-54.
- Purwanto, Agus. *Pelayanan Publik Partisipatif "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik"*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) Hlm. 187
- Lupioadi 2016. *Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktik*, UI. Press, Jakarta
- Rewansyah. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Cet.ke-1. Jakarta: Yusaintanas. hlm.144.
- Saras Adhisti Yulia Pratiwi, 2018, *Reformasi Birokrasi Terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tahun 2014-2015 (Studi Kasus Percepatan Izin UMK di Kecamatan Margadana Kota Tegal*, *jurnal of Politics and government*.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko, D., Chayatin, U., & Dinata, C. (2018). Adaptasi layanan perijinan berbasis teknologi berparadigma *new public service* dalam meningkatkan kualitas layanan dengan *citizen centric*. Seminar Nasional Sistem Informasi, 1120–1130.
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Thoha, Miftah. 2007. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Widiyarta, Agus, 2012, *Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance* (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya), Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Malang, Universitas Brawijaya, hal. 4

Peraturan :

- Keputusan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Nomor 101 tahun 2019 Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Nomor 102 tahun 2019 Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

L

A

M

P

I

R

A

N









